



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 7 Oktober 2021, Pukul 11.21 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Muhammad Isnur
4. Ade Wahyudin
5. Muh. Jamil
6. Eti Octaviani
7. Rony Saputra
8. Ahmad Fauzi
9. Muhammad Busyrol Fuad

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
2. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
3. Sidi Rusgiono (Kemenkumham)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kemenkumham)
5. Andi Batara (Kemenkumham)
6. Ridwan Djamaluddin (Kementerian ESDM)
7. M. Idris F. Sihite (Kementerian ESDM)
8. Muhammad Wafid. A. N (Kementerian ESDM)
9. Sunindyo Suryo Herdadi (Kementerian ESDM)
10. Sujatmiko (Kementerian ESDM)
11. Sony Heru Prasetyo (Kementerian ESDM)
12. Taufik Hidayat (Kementerian ESDM)
13. Muhammad Harris (Kementerian ESDM)
14. Tito Yustian Pratama (Kementerian ESDM)
15. Martin Santosa (Kementerian ESDM)
16. Bagus Prasetyawan (Kementerian ESDM)
17. Adithya Dwi Prawira (Kementerian ESDM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang menurut agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Untuk catatan kehadiran Pemerintah mewakili Presiden dan Pemohon hadir, sementara DPR berhalangan hadir, ada surat pemberitahuan.

Kemudian, Kuasa Presiden ada surat yang meminta penundaan sidang. Jadi, agenda untuk hari ini sebenarnya untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden tidak bisa diteruskan, tidak bisa dilanjutkan karena DPR tidak hadir, dan Pemerintah, Presiden ... Kuasa Presiden meminta penundaan sidang.

Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 8 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan Presiden. Ya, jadi begitu. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 8 November 2021, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).